

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abidin, A.Z., 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana, Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Hukum Terjemahan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Anwar, Saifudin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2010, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta.
- Fahrojih, Ikhwan, dan Mokh. Najih, 2008, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*, In-TRANS Publishing, Malang.
- G. Rai Widjaya, I., 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki, 2006, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Edisi Revisi*, Total Media, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, Hanafi Amrani, dan Dolli S. Ritonga, 2018, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mayson, Stephen W., Derek French, dan Christopher L. Ryan, *Company Law*, Blackstone Press Limited, London, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pramono, Widyono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Priyono, Herry, 2018, *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2006, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok.
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar, 2016, *Hukum Keuangan Negara, Teori dan Praktik, Edisi Ketiga*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Scaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Scaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1994, *Perusahaan Kelompok*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2016, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suta, I Putu Gede Ary, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan SAD Satria Bhakti, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

- Tuanakotta, Theodorus M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Utrecht, E., 1958, *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2008, *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Witanto, D.Y., 2012, *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pembangunan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Mandar Maju, Bandung.

#### B. Artikel Jurnal:

- Aryaputra, M. Iftar, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, "Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur "Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara" dalam Perkara Korupsi", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 2, No. 1, Mei 2017.
- Bârsan, Maria-Magdalena, "Corruption Offenses, Elements of Differentiation Between The New Penal Code and The Old Regulation", *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Blumberg, Phillip, "The Transformation of Modern Corporation Law: The Law of Corporate Groups", *Connecticut Law Review*, Vol. 37, No. 3, Spring 2005.
- Dewi, Rachma Ayu Kusuma, "Akibat Transformasi Saham pada Holdingisasi BUMN Migas terhadap Pengendalian PT PGN Tbk", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4, Juli 2019.
- Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017.
- Isfardiayana, Siti Hapsah, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Isfardiayana, Siti Hapsah, "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kasus Kepailitan", *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2014.
- J., Muhammad Akhdarisa S., La Ode Husen, Sufirman Rahman, dan Ahyuni Yunus, "Limited Company Financial Assets based on State-Owned Enterprises", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 25, No. 7, Juli 2020.
- Karin, Amanda Savira, "Problematisasi Status Kekayaan Negara dalam Permodalan BUMN Persero", *Business Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2017.
- Khairandy, Ridwan, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, Januari 2013.

- Khairandy, Ridwan, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan, Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2009.
- Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2014.
- Lestari, Rani, Isis Ikhwansyah, dan Pupung Faisal, “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Kaitannya dengan Doktrin *Business Judgement Rule*”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018.
- Lisnawati, “Tantangan Pembentukan  *Holding*  Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, *Info Singkat*, Vol. XI, No.01/I/Puslit/Januari/2019, Januari 2019.
- Malau, Parningotan, dan Alvi Syahrin, “An Obligation of Corporate Criminal Liability in the Case of Non-Implementation of Occupational Health and Safety (OHS)”, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. XI, No. 1 (47), Spring 2020.
- Nalle, Victor Imanuel W., “Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2009”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, April 2013.
- Natun, Julio T. K. S., “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, Februari-Juli 2019.
- Paputungan, Merdiansa, “Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017.
- Pratama, Danu Bagus, “Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN”, *Sarjana Ilmu Hukum*, Mei 2015.
- Rahadiyan, Inda, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 4, Oktober 2013.
- Reza Choirul Ramadhan, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan  *Holding*  Induk”, *Media Iuris*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.
- Saputra, Dadin E., dan Afif Khalid, “Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018.
- Siahaan, Maruarar, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009.
- Suastuti, Eny, “Responsibility of Directors State of Enterprise/SOE (Persero)”, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*, Vol. 4, No. 3, Juni 2014.

- Sulistiowati, “Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum dalam Perusahaan Grup”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, No. 3, 2012.
- Sulistiowati, “*Limited Liability* dalam *Limited Liability* pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, Juni 2011.
- S., Chintya Dewi Restyana, Nikmah Mentari, dan Sri Eka Wulandari, “Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam  *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, Mei 2019.
- Wuisang, Ari, “Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Perdata dalam Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah”, *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Yusro, M. Abizar, Ali Ismail Shaleh, dan Hari Sutra Disemadi, “Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui *Business Judgement Rule Doctrine*”, *Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1, 2020.

### C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

- Yuntho, Emerso, Illian D.A. Sari, Jeremiah Limbong, Ridwan Bakar, dan Firdaus Ilyas, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Claudia, Dea, 2012, *Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status Holding Company BUMN di Bidang Pupuk)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Widjaja, M. Syarafie, 2018, *Sita Aset Anak Perusahaan BUMN dalam Holding BUMN*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Annisa, Keysara Nur, 2017, *Tinjauan Yuridis Mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara atas Keputusan Bisnis yang Diambil dari Sisi Hukum Perusahaan*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bakar, Rochmad Abu, 2019, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Holding Badan Usaha Milik Negara atas Kerugian Investasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian Negara (Studi Kasus Investasi PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi di Australia)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Latif, B. Syarifuddin, 2014, *Kerugian Pemegang Saham Negara pada Perseroan Badan Usaha Milik Negara Menurut Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Sakti, Dhenis Prabowo, 2017, *Status Negara dalam Anak Perusahaan BUMN dan Akibat Hukum Akta Pendirian atau Penyertaan Modal ke dalam Anak Perusahaan yang Dibuat oleh Notaris (Studi Kasus PT INKA Persero)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sasworo, Didi Hamdi, 2014, *Konflik Kewenangan dalam Pemeriksaan terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Noor, Hendry Julian, 2018, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### D. Makalah/Pidato

- Moeljatno, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana", *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1995.
- Sulastriyono, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar", *Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

#### E. Artikel Majalah atau Koran

- M. Fatahillah Akbar, "Dilema Memenjara BUMN", *Kompas*, 19 Juli 2019.
- Umbra, "Konsepsi Kerugian Anak Perusahaan BUMN/BUMD dan Pengecualiannya dari Kerugian Negara", *Buletin Klien*, 21 Januari 2021.
- W. Riawan Tjandra, "Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN", *Kompas*, 1 Oktober 2014.
- W. Riawan Tjandra, "Problematika Privatisasi Uang Negara", *Kompas*, 23 Oktober 2013.

#### F. Internet:

- Bank Bukopin, "Kepemilikan Saham, Komposisi Saham PT Bank Bukopin Tbk", <https://www.bukopin.co.id/pages/91-kepemilikan-saham>, diakses 1 April 2021.
- Busyra Azheri, "Syarat Kerugian Anak Usaha BUMN/BUMD Tidak Termasuk Kerugian Negara", <https://www.semangatnews.com/syarat-kerugian-anak-usaha-bumn-bumd-tidak-termasuk-kerugian-negara/2/>, diakses 1 April 2021.
- Detik, "Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA Beberkan 6 Kesalahan Hotasi", <https://news.detik.com/berita/d-3284037/kasus-korupsi->

- merpati-usd-1-juta-ma-beberkan-6-kesalahan-hotasi*, diakses 20 November 2020.
- Hukum Online, “Status Hukum Anak Perusahaan BUMN”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50629054c7269/status-hukum-anak-perusahaan-bumn-persero->, diakses 9 November 2020.
- Hukum Online, “Sifat Fatwa Mahkamah Agung”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung/>, diakses 6 Maret 2021.
- Infomedia Nusantara, “Abous Us”, [https://www.infomedia.co.id/?page\\_id=3987&doing\\_wp\\_cron=1622605680.5771949291229248046875](https://www.infomedia.co.id/?page_id=3987&doing_wp_cron=1622605680.5771949291229248046875), diakses 2 Juni 2021.
- Infomedia Nusantara, “Home”, [https://www.infomedia.co.id/?page\\_id=3987&doing\\_wp\\_cron=1622605680.5771949291229248046875](https://www.infomedia.co.id/?page_id=3987&doing_wp_cron=1622605680.5771949291229248046875), diakses 3 Juni 2021.
- Infomedia Nusantara, “Management Team”, [https://www.infomedia.co.id/?page\\_id=4356](https://www.infomedia.co.id/?page_id=4356), diakses 5 Juni 2021.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses 12 Mei 2020.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi>, diakses 24 Oktober 2020.
- Mahkamah Konstitusi, “Akil Mochtar: Penyelesaian Piutang Bank BUMN Bukan Kewenangan PUPN”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8158>, diakses 10 Maret 2021.
- Pupuk Indonesia, “Anggota Holding”, <https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#holding>, diakses 20 Maret 2021.
- Pupuk Indonesia, “Milestone”, <https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#milestone>, diakses 20 Maret 2021.
- Semen Gresik, “Jejak Langkah Perusahaan”, <https://semengresik.sig.id/id/about>, diakses 20 Maret 2021.
- Sindonews, “Hukum Eks Dirut Anak Perusahaan Telkom Diperberat Jadi 10 Tahun”, <https://nasional.sindonews.com/read/244196/13/hukuman-eks-dirut-anak-perusahaan-telkom-diperberat-jadi-10-tahun-1606223494?showpage=all>, diakses 1 Desember 2020.
- Tirto, “Holding BUMN Jangan Sekadar jadi Jargon dan Mimpi“, <https://tirto.id/holding-bumn-jangan-sekadar-jadi-jargon-dan-mimpi-emHP>, diakses 20 Maret 2021.
- Telkom Indonesia, “Profil Direksi”, [https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/direksi#Afriwandi](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/direksi#Afriwandi), diakses 5 Juni 2021.
- Telkom Metra, “Who We Are”, <https://www.telkommetra.co.id/en/who-we-are#corporate-value>, diakses 3 Juni 2021.

## G. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4654).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 387).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4488).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4980).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3741).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4652).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 48).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 229).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 606).
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 710).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4330).

## **H. Putusan Pengadilan:**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 perihal Kasasi perkara Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan, 9 Maret 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2148 K/Pid.Sus/2011 perihal Kasasi perkara Terdakwa Ir. Alfian Aman, 2 Februari 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 perihal Kasasi perkara Terdakwa Frederick ST Siahaan, 2 Desember 2019.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. perihal Sidang Tingkat Pertama perkara Ir. Nano Kusharyono, M.E., bin Hartono Sukarni, 1 Maret 2013.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14 /Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst perihal Sidang Tingkat Pertama perkara Bona Lambok Pandapotan Parapat
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/2019 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, 27 Juni 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Juli 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Januari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 18 September 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 18 September 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, 25 September 2012.